



DIDUGA BPHTB BANYAK KEBOCORAN

Perlu Instansi Khusus Dongkrak PAD

PEKANBARU (HR)-Wakil Ketua Komisi I DPRD, Kamaruzaman menilai Pemko belum memaksimalkan pemasukan daerah dari sektor pajak dan retribusi khususnya Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Alhasil, masih banyak terjadi kebocoran dari sektor pajak sektor pajak retribusi.

RUDI YANTO
Liputan Pekanbaru

"Pemasukan daerah sebenarnya masih perlu disorot. Karena, masih banyak kebocoran pemasukan daerah dari jual beli pajak tanah rumah. Sehingga perlu instansi khusus untuk pengurusan pemasukan pajak dan retribusi objek jual beli Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," ungkap Kamaruzaman kepada *Haluan Riau*, Kamis (10/4).

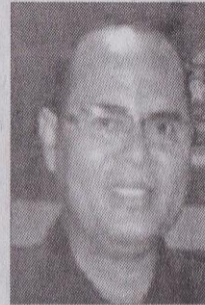
Dijelaskan politisi Demokrat ini, badan atau instansi khusus perlu dibentuk untuk mengurus, memantau pengurusan pajak dan retribusi dari BPHTB agar tidak jadi kebocoran. Sehingga, dengan adanya badan instansi khusus tidak akan ada kebocoran PAD, karena adanya kecurangan pelaporan akibat kompromi penjualan dengan penjual dan pembeli.

"Artinya dalam intensifikasi dan ekstensifikasi perlu pengawasan. Perlu badan in-

stansi untuk memonitornya. Kalau itu dilakukan, maka saya yakin PAD akan meningkat mencapai satu triliun," terang Kamaruzaman.

Disebutkan anggota Dewan Dapil Kecamatan Tampan Payung Sekaki ini, dalam pengawasannya juga dapat dilibatkan dilibatkan instansi atau badan terkait seperti Dispenda, Distarubang. Sehingga akan ada transparansi," tandas Kamaruzaman.

Pada tahun 2014 ini, Pemko bertekad bisa menggenjot PAD di semua sektor. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh target PAD, seperti Dinas Kesehatan, DKP, Dinas Pasar, BPT, Dispenda, dan sebagainya, Wako Firdaus



Kamaruzaman

mengambil kesimpulan bahwa PAD belum keseluruhannya maksimal.

"Makanya tahun depan SKPD diminta lebih aktif lagi untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor baik retribusi, pajak maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah," ujarnya.

Wako juga meminta agar UPTD berupaya menekan biaya-biaya pengelolaan pasar yang tidak perlu sehingga memperkecil subsidi. Dari laporan UPTD Pasar Rumbai, tahun 2013 ini pemko masih harus mengeluarkan subsidi sekitar Rp480 juta.

"Penerimaan Pasar Rumbai saat ini hanya Rp250 juta, sementara biaya Rp730 juta, maka ada subsidi Pemko sebesar 480 juta," urai Wako.***